

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen SatyaWacana

Putri Mega Silvia Pa

NIM : 312012002



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

Juni 2016



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mega Silvia Pa
NIM : 312012002 Email : amber.silvia46@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(Studi Terhadap Putusan - Putusan Mahkamah Konstitusi)
Pembimbing : 1. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 29 Juni 2016





PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 - 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 - 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mega Silva Pa
NIM : 312012002 Email : amber.silva46@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing I dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 29 Juni 2016

Mengetahui,

Dr. Umbu Ranta, S.H., M.Hum
Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Putri Mega Silva Pa
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

(Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Kristen Satya Wacana

Putri Mega Silvia Pa

NIM: 312012002

Pembimbing



Dr. Umbu Rautta, S.H., M.Hum

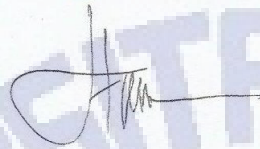
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Juni 2016

Lembar Pengujian

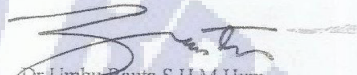
Komisi Penguji

Penguji I



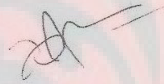
Kustadi S.H., M.Hum

Penguji II



Dr. Limba Rautia, S.H., M.Hum

Penguji III



Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H

Diuji pada tanggal 15 Juni 2016

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. C. Maya Indah, S.H., M.Hum

Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Mega Silvia Pa

Nim : 312012002

Judul Skripsi : Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konsitusi (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 9 Juni 2016



Putri Mega Silvia Pa

KATA PENGANTAR

Isu hukum yang ingin dibahas pada tulisan ini ialah inkonsistensi yang lahir dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh MKRI khususnya putusan yang memiliki substansi yang sama dimana hal tersebut merupakan masalah serius yang masih terjadi di Indonesia hingga dewasa ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk meminimalisir terjadinya inkonsistensi. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk mengetahui latar belakang terjadinya inkonsistensi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MKRI serta mengetahui cara agar menghindari terjadinya inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh MKRI kedepannya yang memiliki substansi yang sama.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 4 Bab, yakni Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang dari isu hukum yang diteliti dan gambaran mengenai permasalahan penelitian mengenai inkonsistensi MKRI, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab II akan menguraikan mengenai *judicial review*, tinjauan mengenai kekuasaan kehakiman, dan tinjauan tentang konsistensi hakim dalam membentuk putusan, Bab III akan menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh MKRI. Bab IV akan menguraikan kesimpulan dan saran.

Salatiga, 9 Juni 2016

Putri Mega Silvia

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*).

Sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan tidak memiliki upaya hukum lain maka selayaknya putusan MKRI dapat menegakkan prinsip negara hukum. Namun pada kenyataannya beberapa putusan MKRI telah dianggap mengalami perdebatan karena telah terjadi inkonsistensi pada putusan yang dibuatnya khususnya putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Inkonsistensi putusan MKRI tercermin dalam Putusan MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah terhadap Putusan MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah dan putusan MKRI Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Putusan MKRI Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disinilah yang menjadi kajian penulis, mengingat hakim MKRI merupakan pemangku konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat oleh sebab itu penting mengetahui latar belakang terjadinya inkonsistensi serta dibutuhkannya suatu upaya untuk mencegah terjadinya inkonsistensi tersebut khususnya mengenai putusan yang memiliki substansi yang sama.

Kata Kunci : *MKRI, putusan, substansi yang sama dan inkonsistensi*

DAFTAR PERATURAN/KASUS

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa daftar peraturan atau kasus yakni :

a. Daftar peraturan yang digunakan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

b. Daftar kasus yang digunakan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang MD3
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah
3. Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

DAFTAR TABEL

Table 1.Perbandingan putusan nomor 76/PUU-XII/2014

Dan putusan nomor 73/PUU-IX/2011	7
--	---

Table 2.Perbandingan putusan nomor 14/PUU-XI/2013

Dan putusan nomor 51-559/PUU-VI/2008	11
--	----



DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Peraturan	v
Daftar Tabel	vi
Abstrak	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang <i>Judicial Review</i>	
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	22
2. Perkembangan <i>Judicial Review</i>	25
B. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman	
1. Pengertian Umum Mengenai Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	30
2. <i>The Bangalore Principle</i>	32
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)	39
C. Tinjauan Tentang Konsistensi Hakim dalam Membentuk Putusan	
1. Pengertian Umum Putusan	42
2. Pertimbangan dan Pengambilan Putusan Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)	43
3. Pengambilan Putusan dalam Sistem Peradilan Di Negara <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i>	

a. Asas Bebas dalam Sistem Peradilan <i>Civil Law</i>	49
b. Asas <i>The Binding Force of Precedent</i> (asas Preseden) Dalam Sistem Peradilan <i>Common Law</i>	51

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-IX/2011 Dalam Hal Pemberian Ijin Penyidikan Oleh Presiden Bagi Anggota DPR dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah	
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014	54
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011	63
3. Analisis Pertimbangan Hakim	68
B. Inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Dalam Hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013	70
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008	76
3. Analisis Pertimbangan Hakim	82
C. Hasil Analisis Terjadinya Inkonsistensi	85
D. Upaya Menghindari Terjadinya Inkonsistensi	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

